

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH THAILAND MENGHENTIKAN BEA MASUK (SAFEGUARDS) ATAS PRODUK BAJA CANAI PANAS DARI NEGARA INDUSTRI PADA TAHUN 2020

Ismiyatun¹, Permata Garneta Putri Pramono²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Email: ismiyatun@unwahas.ac.id

Abstract

The imposition of Safeguard duties is an emergency and temporary additional tariff enacted by the government to protect domestic industries from a surge in imports that could cause significant damage. This study seeks to understand the reasons behind the Thai government's decision to discontinue Safeguard duties on hot-rolled steel products from industrialized countries in 2020. The research employs a qualitative descriptive method, using the foreign policy theory of Snyder, Bruck, and Sapin, which is known as the internal-external setting theory. This theory posits that both internal and external factors can influence foreign policy decisions. Among the internal factors are public opinion on the policy, a decline in the market share of imported steel, and Thailand's strategic position in the Asian automotive market. External factors include Thailand's compliance with World Trade Organization (WTO) regulations, which necessitates liberalization and the cessation of Safeguard duties. Additionally, the threat of trade disputes, such as those posed by Turkey's extension of Safeguard measures, could put Thailand at risk of trade retaliation.

Keywords : Discontinued import duties, Safeguards, Thailand, WTO

Abstrak

Pengenaan bea masuk Safeguards adalah bea masuk tambahan yang bersifat darurat dan sementara berdasarkan kebijakan pemerintah guna melindungi industri dalam negeri akibat dari lonjakan impor yang dapat menyebabkan kerugian serius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah thailand menghentikan bea masuk (safeguards) atas produk baja canai panas dari negara industri pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dari snyder, bruck dan sapin yaitu teori internal eksternal setting. Dimana faktor internal dan external dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Diantaranya yaitu faktor internal karena opini masyarakat terkait kebijakan ini, adanya pangsa impor baja yang menurun dan letak strategis thailand dalam pasar otomotif di asia. Serta faktor external karena sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan WTO, maka liberisasi dan penghentian bea masuk Safeguards menjadi faktor eksternal kebijakan ini dilakukan dan adanya ancaman negara lain berupa sengketa perdagangan yang dilakukan oleh negara turki dengan memperpanjang safeguards dapat menempatkan Thailand dalam risiko pembalasan perdagangan.

Kata Kunci : Penghentian bea masuk, Bea masuk tindak pengamanan, Thailand, WTO

A. PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.²

Menurut Richard Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor - faktor diluar unit keputusan (faktor internal dari setting - setting eksternal) faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi karakteristik kebijakan luar negeri pada setiap periode pemerintahan.³ Apabila setiap Negara, dalam entitasnya menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional maka kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu - isu internasional. Kebijakan Negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri.

Hot rolled steel (baja canai panas) atau baja hitam adalah plat atau produk baja yang dihasilkan dari proses *hot rolling*. Sebagian dapat baja yang sudah diolah dapat langsung digunakan, namun sebagian lagi masih menjadi produk *hot rolled coil* (gulungan) yang memerlukan proses lanjutan. Baja canai panas cenderung lebih berat dan bertekstur kasar serta berpori sebagai dampak proses pengerolan pada suhu tinggi.⁴

Menurut World Trade Organization (WTO) safeguard (tindakan pengamanan) adalah tindakan ‘darurat’ sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu, yang telah menyebabkan atau mengancam dapat menyebabkan kerugian serius pada industri dalam

¹ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.

² James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press.

³ Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin. 1962. Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics. Glencoe: Free Press.

⁴ KPS Steel. *Lebih Jauh Tentang Hot Rolled Steel Dan Cold Rolled Steel*. Retrieved June 15, 2023, from https://kpssteel.com/educational/lebih-jauh-tentang-hot-rolled-steel-dan-cold-rolled-steel/#Hot_Rolled_Steel

negeri.⁵

Penerapan tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari peningkatan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri. Peningkatan produk impor secara absolut maupun relatif juga harus diikuti dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor lain yang relevan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

Safeguard juga harus bersifat sementara dan dikenakan hanya jika impor diketahui menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi industri dalam negeri atas produk yang bersaing. Dengan demikian, safeguard semata-mata diterapkan untuk penyesuaian industri dalam negeri yang menghadapi tekanan dan memiliki batasan waktu.

Industri baja merupakan industri yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Thailand karena baja diperlukan untuk produksi industri hilir yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini perekonomian Thailand telah berpengaruh pesat baik dalam industri manufaktur, sektor real estate, sektor konstruksi, dan sektor jasa mengakibatkan peningkatan permintaan baja di dalam negeri. Thailand saat ini diklasifikasikan sebagai importir baja yang dianggap menjadi salah satu dari 5 perusahaan terbesar di dunia tetapi masih di belakang Tiongkok dan Amerika Serikat yang merupakan importir terbesar.

Pemerintah Thailand memberhentikan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (safeguard) atas produk baja canai panas dari seluruh negara produsen baja kecuali negara berkembang.. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan berdasarkan laporan temuan akhir penyelidikan safeguard yang dirilis pada 6 juni 2020 dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit.⁶

Tindakan safeguard baja canai panas telah diterapkan Pemerintah Thailand sejak Desember 2014. Namun, sejumlah negara berkembang berhasil memperoleh pengecualian. Saat itu, bea masuk safeguard pertama kali ditetapkan sebesar 21,92 persen. Pada 2016 tarif diturunkan menjadi 21,52 persen. Kemudian, pada 2017 diturunkan menjadi 21,13 persen. Setelah dilakukan review pertama, pengenaan safeguard diperpanjang hingga 6 Juni 2020.

⁵ WTO | Trade topics - Safeguards Gateway. (n.d.). World Trade Organization. Retrieved June 12, 2023, from https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm

⁶ Trade Protection and Response Division Department of Foreign Trade Ministry of Commerce. (n.d.). Trade Protection and Response Division Department of Foreign Trade Ministry of Commerce. Retrieved June 12, 2023, from <https://www.thaitr.go.th/th/search/SG1004>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor alasan apa saja Pemerintah Thailand Menghentikan Bea Masuk (*Safeguards*) Atas Produk Baja Canai Panas Dari Negara Industri Pada Tahun 2020.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Menurut Nazir (1988) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti baik status sekelompok manusia, kondisi, objek, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷ Adapun tujuan jenis penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat maupun hubungan antar fenomena yang diteliti. Sedangkan metode penelitian kualitatif diartikan sebagai mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang peneliti, menentukan realita yang beragam selama penelitian dilakukan.

Sumber data informasi dan bahan pada proses penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui konferensi pers dan dokumen Pemerintah perdagangan Thailand, WTO, buku, arsip, jurnal, berita, website dan lain lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka (library research), dengan pengumpulan data melalui situs portal online. Teknik pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara-negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk memperkuat hubungan perdagangan, menarik investasi, dan mengatasi tantangan ekonomi global seperti krisis dan perlambatan. Kolaborasi antarnegara dalam menghadapi disrupsi rantai pasokan dan perlambatan ekonomi juga menjadi fokus, yang menunjukkan pentingnya kebijakan luar negeri dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

⁷ Nazir, M. (1988). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mark R. Amstutz (1995) mendefinisikan kebijakan luar negeri “*Explicit and implicit actions of governmental officials design to promote national interest beyond a country’s territorial boundaries*”⁸ yaitu sebagai tindakan pemerintah yang secara implisit maupun eksplisit dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional terhadap lingkungan internasional.

Melalui definisi tersebut ada tiga penekanan utama, yakni tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melampaui batas sebuah negara.

Dalam konteks global, kebijakan luar negeri berfungsi sebagai alat vital bagi negara untuk berintegrasi dan memenuhi kebutuhan domestiknya, yang tidak dapat terpenuhi hanya melalui kebijakan dalam negeri. Keterkaitan erat antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik mencerminkan bahwa kebijakan luar negeri sering kali dirancang untuk melengkapi kebijakan domestik, sekaligus memperkuat posisi negara tersebut di panggung politik internasional.

Eksistensi dan kepentingan nasional sebuah negara tidak dapat dipenuhi secara maksimal hanya melalui kebijakan domestik. Di sinilah kebijakan luar negeri memainkan peran penting, muncul sebagai hasil dari ketergantungan suatu negara pada interaksi dengan negara lain. Dengan demikian, kebijakan luar negeri bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dan keamanan, tetapi juga upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas nasional dalam kerangka hubungan internasional yang dinamis.

Menurut K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional suatu kerangka analisis mengemukakan : “Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut”⁹ Secara singkatnya, kebijakan luar negeri merupakan suatu instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor lain dalam politik dunia demi mencapai kepentingan nasionalnya. Masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, dan tentunya kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda, tergantung dari tujuan yang hendak dicapai suatu negara tertentu walaupun mungkin kepentingan nasional suatu negara serupa, tentu saja masing-masing negara memiliki caranya masing-masing untuk mencapai

⁸Amstutz, Mark R. 1995. *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown and Benchmark.

⁹Holsti, K.J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

kepentingan nasional tersebut. Suatu negara belum tentu dapat mencapai kepentingan nasionalnya secara domestik, di dalam negara itu sendiri

Teori kebijakan Luar Negeri (Teori Internal Eksternal Setting Dari Snyder, Bruck dan Sapin) . Richard Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin adalah tokoh awal yang mengkaji teori - teori kebijakan luar negeri. Mereka mencoba mengkaji lebih dalam *state* yang di dalam perspektif realisme hanya dijelaskan sebagai aktor utama memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara yang tidak diuraikan secara lebih lanjut. Mereka mengatakan penting menganalisis aktor - aktor (para pembuat keputusan resmi) dalam hal - hal berikut :

- 1) Pemilahan dan penghubungan obyek - obyek, kondisi - kondisi dan aktor - aktor lain dalam berbagai hal dipersepsikan atau diharapkan dalam suatu konteks hubungan.
- 2) Keberadaan definisi dari tujuan - tujuan yang ingin dicapai dari sebuah fenomena atau situasi.
- 3) Pengaitan signifikansinya terhadap berbagai tindakan yang dihubungkan dengan situasi mengikuti beberapa kriteria pengiraan.
- 4) Penerapan standards of acceptability yang mempersempit pilihan persepsi, mempersempit pilihan obyek - obyek yang diinginkan, dan mempersempit jumlah alternatif.

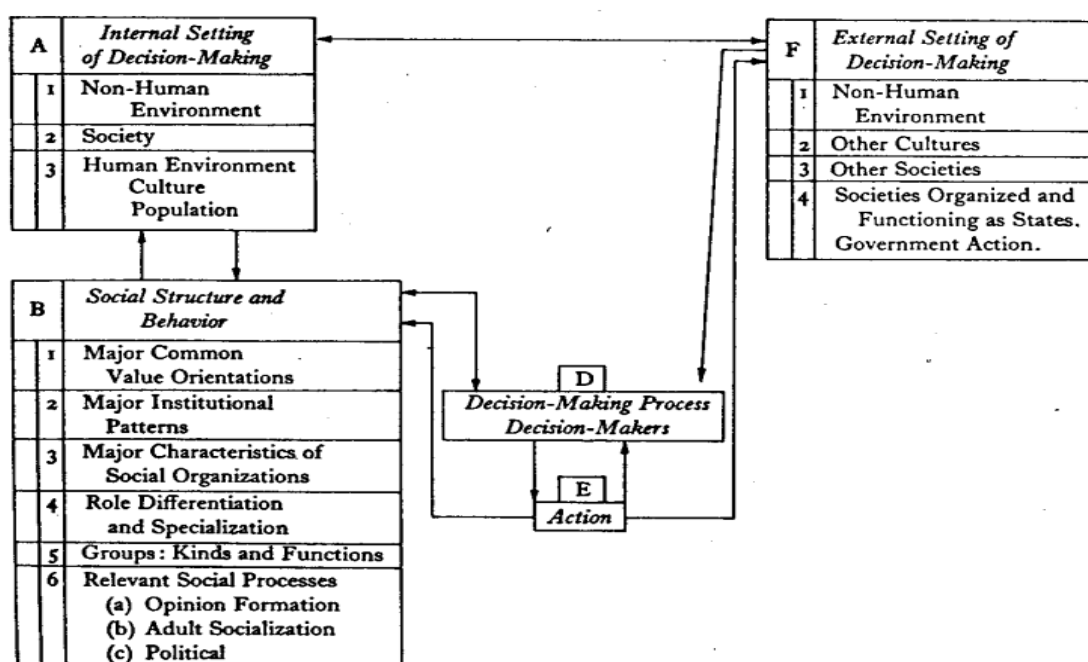
Teori kebijakan memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus di pertimbangkan oleh Negara. Faktor interaksi internal dan eksternal akan membentuk preferensi negara pada pembuatan kebijakan luar Negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan Negara. sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan Negara lain serta situasi dunia. Dalam hal ini dikatakan apabila Negara A memiliki kebijakan mengenai isu tertentu, dan apabila hal itu akan mempengaruhi preferensi Negara B yang merupakan Negara tetangga atau bagian dari ruang lingkup regional dari Negara A maka tentunya preferensi Negara B akan represif untuk merespon mengenai kebijakan yang dibuat oleh Negara.

Faktor eksternal yang merupakan, kondisi yang ada di luar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain, serta adanya campur tangan dari organisasi internasional dan regional. Faktor eksternal menghubungkan tentang hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional dan Negara sebagai aktor dalam proses pembuat keputusan. Tindakan yang dilakukan oleh Negara di tingkat internasional diatur oleh kepentingan nasional.

Pada level internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Kehadiran organisasi internasional seperti WTO, organisasi regional dan sebagainya akan mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A. Disamping itu, kebijakan luar negeri suatu negara akan mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional.

Snyder mengakui bahwa keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor - faktor diluar unit keputusan (faktor internal dari setting - setting eksternal) Setting adalah seperangkat pengelompokan faktor faktor yang secara potensial relevan dan kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi tindakan hal yang mempengaruhi pembuatan keputusan negara tersebut terdiri dari dua hal yaitu internal dan eksternal. Faktor internal memberi arah pedoman kepada cara - cara masyarakat suatu negara diorganisasikan dan berfungsi. Di dalam ciri - ciri dan perilaku Masyarakat dan kebiasaan masyarakat suatu negara, politik domestik, opini publik, lingkungan masyarakat yang meliputi populasi dan kebudayaan suatu negara serta lingkungan bukan manusia yang mencakup infrastruktur maupun alat penunjang kegiatan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Sedangkan faktor eksternal mencakup aksi reaksi dari negara lain, organisasi internasional, kebudayaan dari negara lain, ataupun masyarakat dari luar wilayah negara.¹⁰

¹⁰Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin. 1962. Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics. Glencoe: Free Press. Hal 202-203



Dengan demikian pendekatan pembuatan keputusan politik luar negeri sangatlah kompleks, akan tetapi dapat ditarik dan diwakili dengan dua interval yang berpengaruh sangat kuat sekali di dalam metode pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Melalui tabel tersebut, maka teori kebijakan luar negeri memberikan penggambaran mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari Negara. Tetapi dalam hal Thailand memberhentikan pengenaan bea masuk *safeguards* produk baja canai panas dari negara industri yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah faktor eksternal.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Thailand menghentikan bea masuk (*safeguards*) produk baja canai panas pada tahun 2020 sebagai tindakan pengamanan terhadap negara industri, mempunyai alasan karena didorong oleh 2 faktor yaitu Faktor Internal, pertama adalah Opini Publik , hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada kerugian serius akibat lonjakan impor baja. Industri dalam negeri telah mampu bersaing dengan produk impor, dibuktikan dengan peningkatan produktivitas, lapangan pekerjaan, dan penurunan impor. Selain itu, banyak pihak dalam industri domestik, seperti Thai Oil Public Company Limited dan Nippon Steel Corporation JFE, menentang perpanjangan ini karena mereka menganggap tindakan proteksionis tersebut akan merugikan

kepentingan publik, menghambat persaingan, dan meningkatkan biaya. Perlindungan bea masuk yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun dianggap cukup untuk membantu industri dalam negeri menyesuaikan diri dengan lonjakan impor.

Faktor internal kedua adalah Kekuatan Nasional. Industri baja dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan nasional dengan peningkatan produktivitas, penurunan impor, dan pembukaan lapangan kerja. Sektor konstruksi mendominasi konsumsi baja di Thailand, diikuti oleh sektor otomotif dan peralatan listrik. Dengan stabilnya pasar baja domestik dan penurunan pangsa impor, pemerintah merasa tidak perlu lagi memperpanjang bea masuk safeguards. Penghentian bea masuk ini menguntungkan Masyarakat sebagai konsumen dalam negeri karena menurunkan biaya dan harga produk.

Ketiga, Letak Geografis. Thailand sebagai negara yang strategis di Asia Tenggara, telah menjadi produsen baja canai panas yang signifikan, yang mendukung berbagai sektor industri termasuk otomotif dan konstruksi. Baja canai panas Thailand memiliki sifat unggul seperti kekuatan, ketahanan, dan kemampuan pembentukan, yang membuatnya sangat dibutuhkan dalam berbagai aplikasi industri. Thailand juga merupakan produsen otomotif terbesar di ASEAN dan ke-12 di dunia, dengan industri otomotif yang terus berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Dengan struktur pasar otomotif yang luas dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, Thailand diproyeksikan terus maju dalam industri otomotif dan baja, mendukung pembangunan nasional dan regional.

Terdapat dua faktor eksternal, yaitu sistem internasional dan aksi reaksi dari negara lain. Negara Thailand sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) wajib mematuhi Perjanjian Pengamanan WTO yang mengatur penerapan tindakan pengamanan impor untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat peningkatan impor. Thailand telah menerapkan tindakan pengamanan pada produk baja canai panas non paduan sejak 2014 dan memperpanjangnya hingga 2020. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengamanan, termasuk durasi yang tidak melebihi 8 tahun, liberalisasi tarif secara bertahap, dan konsultasi serta pemberitahuan kepada Komite Pengamanan WTO.

Perjanjian Pengamanan (Perjanjian Safeguards) menetapkan aturan penerapan tindakan pengamanan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994. Tindakan pengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu, dimana impor tersebut menyebabkan atau mengancam kerugian serius terhadap industri dalam negeri Anggota

pengimpor. Yang dalam arti luas berupa penangguhan atau kewajiban, dapat berupa pembatasan impor secara kuantitatif (kuota) atau kenaikan bea masuk yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan.

Thailand terlibat dalam sengketa perdagangan terkait pengenaan bea masuk pengamanan pada produk baja canai panas non paduan dari 2014 hingga 2020. Akibat tindakan ini, Turki mengenakan bea masuk pembalasan sebesar 9,27% pada impor mesin pendingin udara dari Thailand, berlaku dari 5 September 2017 hingga 4 September 2020. Thailand menuduh Turki melanggar ketentuan GATT 1994 dan Perjanjian Pengamanan WTO karena penangguhan konsesi yang berlebihan dan diskriminatif. Sengketa ini berakhir pada 19 November 2021 setelah pemerintah Thailand menghentikan pengenaan bea masuk safeguards baja canai panas pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstutz, Mark R. 1995. *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown and Benchmark.
- Eby Hara, Abu Bakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri , Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Nuansa, Bandung.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Rosenau, James N et all. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin. 1962. *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. Glencoe: Free Press.

JURNAL

- Academia.edu. Diakses pada 16 Juni 2023, dari https://www.academia.edu/27636907/Impact_of_the_Elimination_of_customs_tariff_by_WTO_member_for_the_ASEAN_5_Macroeconomics_using_Global_Trade_Analysis_Project_GTAP_Approach
- Deyanputri, N. F. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK. 10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Imam, A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Barang Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(02).

- Kurniawan. 2020. *Kepentingan Indonesia Meratifikasi International Coffee Agreement*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau vol 2, no 2
- Pathit Damkham. (2021). Factors affecting the determination of Thailand's demand for imported hot rolled steel sheets from China. University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). <http://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4350>
- Siahaan, Y. (n.d.). *Impact of the Elimination of customs tariff by WTO member for the ASEAN-5 Macroeconomics: using Global Trade Analysis Project (GTAP) Approach*

WEBSITE

- Department of Foreign Trade, 2020. *Opening a review of the need to extend the enforcement of import protection measures unalloyed hot rolled steel products in coils and non coils are incereasing*. Royal Gazette
- Kementerian Perdagangan. 2020. Thailand Hentikan Penerapan Bea Masuk Safeguard Baja Canai Panas, Mendag: Peluang Ekspor Makin Besar. Diakses pada 31 Desember 2022. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/thailand-hentikan-penerapan-bea-masuk-safeguard-baja-canai-panas-mendag-peluang-ekspor-makin-besar>
- KPS STEEL. (2019). *Lebih Jauh Tentang Hot Rolled Steel Dan Cold Rolled Steel*. Diakses pada 15 juni 2023 https://kpssteel.com/educational/lebih-jauh-tentang-hot-rolled-steel-dan-cold-rolled-steel/#Hot_Rolled_Steel
- List of steel entrepreneurs in Thailand*. (n.d.). IIU | Iron & Steel Intelligence Unit | List of steel entrepreneurs in Thailand. Diakses pada 12 Juni 2023, dari <https://iiu.isit.or.th/th/directory/category.aspx?Group=1&Category=27>
- National Economic and Social Development Council. (n.d.). Retrieved from https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/main.php?filename=national_account
- Pariona, A. (2018). The biggest industries in Thailand. Retrieved from <https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-industries-in-thailand.html>
- Trade Interests and Remedies Division. (n.d.). Diakses pada 10 Februari 2024 dari <https://thaitr.dft.go.th/en/search/SG1004>
- WITS. (n.d.). *Thailand Trade Summary 2019*. Diakses pada 11 Februari 2024 dari <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/THA/Year/2019/Summarytext>
- World Bank Open Data. (n.d.) *GDP Current data Thailand*. Diakses pada 1 maret 2024 dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=TH&start=1960>
- WTO, Committee on Safeguards, Notification under Article 12.1 (A) of the Agreement on Safeguards, Thailand, Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils, (Document G/SG/N/6/THA/4)
- World Trade Organization. (n.d.). *Safeguards Measures*. Diakses pada 12 juni 2023, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm
- World Trade Organization. 2020. Doc G/SG/N/14/THA/3/Suppl.1
- World Trade Organization. n.d. Article VII : Valuation for Customs Purposes

World Trade Organization, n.d. *List of Document G/SG/N/14/THA/3/Suppl.1 and Suppl.3, G/SG/N/6/THA/4/Suppl.2 and Suppl.4.*

World Trade Organization, n.d. *Thailand initiates WTO dispute complaint against Turkish duties on air conditioners.*DS573

WTO Trade topics - Safeguards Gateway. (n.d.). World Trade Organization. Retrieved June 12, 2023, from https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm